

**URBANISASI, MIGRASI, DAN PERUBAHAN BUDAYA DALAM RUANG
KEHIDUPAN MASYARAKAT ADAT DI TENGAH ALIH FUNGSI LAHAN
DAN EKSPANSI PEMBANGUNAN**

Febrio Rozalmi Putra¹, Sumanti², Yusparni Yetti³, Putri Yulia Mandasari⁴,
Mulya Syafrina⁵

^{1,2,3,4,5}Program Studi Pendidikan Dasar S2, Universitas Adzkia

febriorozalmiputra1350@gmail.com¹, sumanti@adzkia.ac.id²,
yusparniyeti12@admin.sd.belajar.id³, putrimandasari488@gmail.com⁴,
mulyasyafrina1988@gmail.com⁵

ABSTRACT

Urbanization, migration, and cultural transformation have become significant issues in contemporary development, particularly in areas experiencing rapid land-use change and large-scale development expansion. The conversion of customary forests, agricultural lands, and indigenous territories into industrial, plantation, mining, and infrastructure zones has reshaped social spaces and altered the relationship between communities and their environment. This study aims to analyze the impacts of urbanization, migration, and cultural change within spatial contexts, particularly in relation to land conversion and development expansion as reflected in contemporary social realities. The research employs a literature review method by examining books, scientific journals, policy documents, and relevant academic publications. The findings indicate that land-use change not only transforms physical landscapes but also affects social structures, economic activities, population mobility, and cultural identity. Urbanization and migration contribute to demographic changes, shifts in livelihoods, and the emergence of new social interactions. At the same time, indigenous communities often face challenges in maintaining traditional values, local wisdom, and cultural practices amid increasing external influences. Development policies that prioritize economic growth without considering socio-cultural sustainability may lead to social conflicts and the erosion of cultural heritage. Therefore, balanced development strategies that integrate economic progress, environmental protection, and cultural preservation are essential. The study concludes that sustainable spatial development requires active community participation and policies that recognize the rights and cultural identities of local and indigenous populations.

Keywords: urbanization, migration, cultural change, land-use conversion, indigenous communities.

ABSTRAK

Urbanisasi, migrasi, dan perubahan budaya merupakan isu penting dalam pembangunan kontemporer, terutama pada wilayah yang mengalami alih fungsi lahan dan ekspansi pembangunan secara masif. Perubahan kawasan hutan adat, lahan pertanian, dan ruang hidup masyarakat menjadi kawasan industri, perkebunan, pertambangan, maupun infrastruktur telah mengubah hubungan masyarakat dengan ruang kehidupannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak urbanisasi, migrasi, dan perubahan budaya dalam ruang yang berkaitan dengan alih fungsi lahan serta ekspansi pembangunan. Penelitian

menggunakan metode kajian literatur dengan menelaah berbagai buku, jurnal ilmiah, dokumen kebijakan, dan publikasi akademik yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa alih fungsi lahan tidak hanya mengubah kondisi fisik wilayah, tetapi juga memengaruhi struktur sosial, aktivitas ekonomi, mobilitas penduduk, serta identitas budaya masyarakat. Urbanisasi dan migrasi mendorong perubahan demografi, pergeseran mata pencaharian, serta munculnya pola interaksi sosial baru. Di sisi lain, masyarakat adat menghadapi tantangan dalam mempertahankan nilai-nilai tradisional, kearifan lokal, dan praktik budaya di tengah masuknya pengaruh eksternal. Kebijakan pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi tanpa memperhatikan keberlanjutan sosial budaya berpotensi menimbulkan konflik sosial dan hilangnya warisan budaya lokal. Oleh karena itu, diperlukan strategi pembangunan yang seimbang antara kemajuan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan pelestarian budaya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembangunan ruang yang berkelanjutan memerlukan partisipasi aktif masyarakat serta kebijakan yang menghormati hak dan identitas budaya masyarakat lokal maupun adat.

Kata Kunci: urbanisasi, migrasi, perubahan budaya, alih fungsi lahan, masyarakat adat.

A. Pendahuluan

Urbanisasi merupakan salah satu fenomena sosial yang paling menonjol dalam perkembangan masyarakat modern. Pertumbuhan kota yang pesat telah mendorong perubahan struktur ruang, pola permukiman, dan aktivitas ekonomi masyarakat. Menurut Kingsley Davis (1965), urbanisasi merupakan proses meningkatnya proporsi penduduk yang tinggal di wilayah perkotaan akibat pertumbuhan alami maupun perpindahan penduduk dari desa ke kota.

Perkembangan urbanisasi tidak dapat dipisahkan dari proses pembangunan ekonomi yang terjadi di berbagai wilayah. Pertumbuhan industri, pembangunan infrastruktur, dan perluasan kawasan ekonomi menjadi faktor yang menarik perpindahan penduduk ke wilayah-wilayah yang dianggap memiliki peluang ekonomi lebih baik. Menurut Todaro dan Smith (2021), urbanisasi merupakan konsekuensi dari transformasi ekonomi yang ditandai oleh pergeseran tenaga kerja dari

sektor tradisional menuju sektor modern.

Selain urbanisasi, migrasi juga menjadi fenomena penting dalam perubahan ruang sosial masyarakat. Migrasi merupakan perpindahan penduduk dari satu wilayah ke wilayah lain dengan tujuan memperoleh kehidupan yang lebih baik. Lee (1966) menjelaskan bahwa migrasi dipengaruhi oleh faktor pendorong dari daerah asal dan faktor penarik dari daerah tujuan. Faktor ekonomi, pendidikan, pekerjaan, dan pembangunan sering kali menjadi alasan utama perpindahan penduduk.

Perkembangan pembangunan yang semakin masif telah mendorong terjadinya perubahan penggunaan lahan di berbagai wilayah Indonesia. Lahan pertanian, kawasan hutan, dan wilayah adat secara bertahap mengalami transformasi menjadi kawasan industri, perkebunan, pertambangan, maupun proyek infrastruktur. Perubahan tersebut tidak hanya berdampak terhadap lingkungan, tetapi juga memengaruhi kehidupan sosial dan budaya

masyarakat yang bergantung pada ruang tersebut.

Dalam perspektif geografi sosial, ruang tidak hanya dipahami sebagai wilayah fisik, tetapi juga sebagai tempat berlangsungnya aktivitas sosial dan budaya masyarakat. Menurut Henri Lefebvre (1991), ruang merupakan hasil konstruksi sosial yang dibentuk melalui interaksi manusia, kekuasaan, dan aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, perubahan ruang akan selalu berdampak terhadap kehidupan sosial masyarakat.

Fenomena alih fungsi lahan yang terjadi di berbagai daerah menunjukkan adanya hubungan erat antara pembangunan dan perubahan budaya. Ketika ruang hidup masyarakat berubah, maka pola interaksi sosial, sistem mata pencaharian, dan nilai-nilai budaya juga mengalami perubahan. Kondisi ini terlihat pada berbagai komunitas adat yang menghadapi tekanan akibat ekspansi pembangunan dan investasi skala besar.

Salah satu isu yang menjadi perhatian publik adalah perubahan ruang hidup masyarakat adat akibat ekspansi perkebunan dan proyek pembangunan berskala besar. Fenomena ini digambarkan dalam film dokumenter *Pesta Babi* yang memperlihatkan bagaimana masyarakat adat menghadapi ancaman kehilangan hutan, tanah adat, dan sumber kehidupan mereka akibat alih fungsi lahan. Film tersebut menunjukkan bahwa pembangunan tidak hanya berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menyangkut keberlanjutan budaya dan identitas masyarakat.

Menurut Koentjaraningrat (2015), budaya merupakan keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia

yang diperoleh melalui proses belajar dalam kehidupan masyarakat. Ketika ruang yang menjadi tempat berkembangnya budaya mengalami perubahan, maka budaya itu sendiri akan mengalami penyesuaian, transformasi, bahkan kehilangan sebagian unsur-unsurnya.

Perubahan budaya akibat urbanisasi dan migrasi dapat terlihat dari perubahan pola hidup masyarakat, pergeseran nilai-nilai sosial, hingga berkurangnya praktik-praktik budaya tradisional. Menurut Giddens (2013), modernisasi dan globalisasi mendorong terjadinya perubahan sosial yang memengaruhi identitas individu maupun kelompok masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan.

Di sisi lain, urbanisasi dan migrasi juga memberikan dampak positif berupa peningkatan akses terhadap pendidikan, kesehatan, teknologi, dan peluang ekonomi. Namun, manfaat tersebut sering kali disertai dengan munculnya berbagai persoalan sosial seperti konflik agraria, kesenjangan sosial, marginalisasi masyarakat lokal, dan hilangnya ruang budaya tradisional.

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan perlindungan budaya menjadi aspek yang sangat penting. Menurut Brundtland (1987), pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan yang mampu memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya sendiri.

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai urbanisasi, migrasi, dan perubahan budaya dalam ruang menjadi penting untuk dilakukan. Kajian ini bertujuan menganalisis

bagaimana alih fungsi lahan dan ekspansi pembangunan memengaruhi kehidupan sosial budaya masyarakat, khususnya masyarakat adat, serta mengidentifikasi strategi yang dapat dilakukan untuk mewujudkan pembangunan yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kajian literatur (*literature review*) untuk menganalisis fenomena urbanisasi, migrasi, dan perubahan budaya dalam ruang yang terjadi akibat alih fungsi lahan dan ekspansi pembangunan. Kajian literatur merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan, menelaah, mengevaluasi, dan mensintesis berbagai sumber ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Menurut Zed (2018), kajian literatur merupakan kegiatan penelitian yang memanfaatkan berbagai sumber pustaka sebagai bahan utama dalam memperoleh data dan informasi penelitian.

Sumber data dalam penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh dari buku, artikel jurnal nasional dan internasional, laporan penelitian, dokumen kebijakan pemerintah, laporan organisasi internasional, serta publikasi ilmiah yang membahas urbanisasi, migrasi, perubahan budaya, masyarakat adat, alih fungsi lahan, dan pembangunan wilayah. Pemilihan sumber dilakukan berdasarkan tingkat relevansi, kredibilitas, dan keterkaitannya dengan fokus penelitian.

Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur yang berkaitan dengan tema penelitian. Literatur yang diperoleh kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema-

tema utama, yaitu urbanisasi, migrasi, perubahan budaya, transformasi ruang, alih fungsi lahan, dan pembangunan. Selanjutnya, berbagai informasi yang relevan dianalisis secara sistematis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai hubungan antarvariabel yang dikaji.

Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*). Menurut Krippendorff (2018), analisis isi merupakan metode yang digunakan untuk memahami makna dan isi suatu dokumen secara sistematis dan objektif. Dalam penelitian ini, berbagai teori, konsep, dan hasil penelitian terdahulu dibandingkan serta diinterpretasikan untuk menghasilkan sintesis yang dapat menjelaskan fenomena urbanisasi, migrasi, dan perubahan budaya dalam ruang kehidupan masyarakat.

Untuk menjaga validitas kajian, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dengan membandingkan informasi yang berasal dari berbagai referensi ilmiah yang berbeda. Melalui pendekatan tersebut, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang objektif dan mendalam mengenai dampak alih fungsi lahan dan ekspansi pembangunan terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat dalam konteks pembangunan berkelanjutan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan Urbanisasi dan Transformasi Ruang dalam Pembangunan Modern

Urbanisasi merupakan salah satu proses yang paling berpengaruh terhadap perubahan ruang dalam masyarakat modern. Pertumbuhan kota yang pesat menyebabkan terjadinya perubahan fungsi lahan dari

kawasan pertanian, hutan, dan permukiman tradisional menjadi kawasan industri, perdagangan, dan perumahan. Menurut Davis (1965), urbanisasi merupakan konsekuensi logis dari modernisasi ekonomi yang mendorong konsentrasi penduduk dan aktivitas ekonomi di wilayah perkotaan. Proses ini tidak hanya terjadi di negara maju, tetapi juga menjadi fenomena yang sangat menonjol di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.

Perkembangan urbanisasi dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pertumbuhan industri, peningkatan investasi, pembangunan infrastruktur, dan perluasan kesempatan kerja di perkotaan. Kota dipandang sebagai pusat aktivitas ekonomi yang mampu memberikan peluang kehidupan yang lebih baik dibandingkan wilayah pedesaan. Todaro dan Smith (2021) menjelaskan bahwa urbanisasi terjadi karena adanya perbedaan kesempatan ekonomi antara desa dan kota yang mendorong perpindahan penduduk secara terus-menerus.

Perubahan ruang akibat urbanisasi tidak hanya terjadi secara fisik, tetapi juga memengaruhi pola kehidupan masyarakat. Kawasan yang sebelumnya berfungsi sebagai ruang sosial dan budaya masyarakat lokal sering kali mengalami transformasi menjadi ruang ekonomi yang berorientasi pada keuntungan. Akibatnya, hubungan masyarakat dengan ruang hidupnya mengalami perubahan yang cukup signifikan. Ruang yang sebelumnya digunakan untuk aktivitas sosial dan budaya beralih fungsi menjadi kawasan komersial yang lebih menekankan aspek ekonomi.

Dalam perspektif Lefebvre (1991), ruang merupakan produk sosial yang dibentuk melalui relasi

kekuasaan dan aktivitas ekonomi. Ruang tidak hanya dipahami sebagai tempat fisik, tetapi juga sebagai hasil interaksi berbagai kepentingan yang ada dalam masyarakat. Ketika pembangunan lebih menekankan pertumbuhan ekonomi, maka ruang cenderung mengalami komersialisasi sehingga fungsi sosial dan budaya menjadi semakin berkurang.

Urbanisasi juga menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang menarik arus migrasi dari berbagai wilayah. Akibatnya, struktur demografi menjadi lebih heterogen dan kompleks. Masyarakat yang sebelumnya relatif homogen mulai berinteraksi dengan kelompok-kelompok baru yang memiliki latar belakang budaya, bahasa, dan nilai sosial yang berbeda. Kondisi ini dapat memperkaya kehidupan sosial, tetapi juga berpotensi menimbulkan konflik apabila tidak dikelola dengan baik.

Selain memengaruhi struktur sosial, urbanisasi juga berdampak terhadap perubahan pola permukiman. Pertumbuhan jumlah penduduk di perkotaan menyebabkan meningkatnya kebutuhan terhadap lahan perumahan dan fasilitas umum. Banyak kawasan hijau dan lahan produktif yang kemudian dialihfungsikan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Menurut UN-Habitat (2022), perkembangan kota yang tidak terencana dapat menimbulkan berbagai permasalahan seperti kepadatan penduduk, kemacetan, dan penurunan kualitas lingkungan.

Di Indonesia, urbanisasi telah menjadi fenomena yang berlangsung secara cepat dalam beberapa dekade terakhir. Pembangunan kawasan industri, perkebunan, dan proyek strategis nasional telah mengubah banyak wilayah pedesaan menjadi kawasan ekonomi baru. Kota-kota

besar seperti Jakarta, Surabaya, Medan, dan Makassar mengalami pertumbuhan yang sangat pesat sehingga menarik penduduk dari berbagai daerah untuk bermigrasi.

Perubahan ruang akibat urbanisasi juga memengaruhi pola interaksi sosial masyarakat. Masyarakat perkotaan cenderung memiliki hubungan sosial yang lebih individualistik dibandingkan masyarakat pedesaan yang masih mempertahankan nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong. Tönnies (2017) menjelaskan bahwa modernisasi mendorong perubahan dari pola hubungan sosial berbasis komunitas (*gemeinschaft*) menuju hubungan sosial yang lebih rasional dan berorientasi pada kepentingan individu (*gesellschaft*).

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, urbanisasi perlu dikelola secara bijaksana agar tidak menimbulkan dampak negatif yang lebih besar. Perencanaan tata ruang yang baik harus mampu mengakomodasi kebutuhan pembangunan ekonomi sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan dan kehidupan sosial budaya masyarakat. Pengelolaan ruang yang tidak memperhatikan aspek tersebut berpotensi menimbulkan ketimpangan sosial dan kerusakan lingkungan yang sulit diperbaiki.

Dengan demikian, urbanisasi tidak hanya mengubah bentang fisik suatu wilayah, tetapi juga mengubah struktur sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat yang hidup di dalamnya. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan harus mampu mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan agar transformasi ruang yang terjadi dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Alih Fungsi Lahan sebagai Pemicu Perubahan Sosial

Alih fungsi lahan merupakan salah satu dampak yang paling nyata dari ekspansi pembangunan di berbagai wilayah. Perubahan fungsi kawasan pertanian, hutan, dan tanah adat menjadi kawasan industri, perkebunan, pertambangan, atau infrastruktur telah mengubah pola kehidupan masyarakat secara signifikan. Fenomena ini semakin meningkat seiring dengan kebutuhan pembangunan yang terus berkembang dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Menurut Bryant dan Johnston (1992), perubahan penggunaan lahan merupakan proses yang terjadi ketika kebutuhan ekonomi dan pembangunan mendorong pemanfaatan ruang yang berbeda dari fungsi awalnya. Perubahan tersebut sering kali dianggap sebagai konsekuensi dari modernisasi dan pembangunan wilayah. Namun demikian, dampaknya tidak hanya dirasakan pada aspek ekonomi, tetapi juga pada kehidupan sosial dan budaya masyarakat.

Alih fungsi lahan menyebabkan berkurangnya akses masyarakat terhadap sumber daya alam yang selama ini menjadi sumber kehidupan mereka. Masyarakat yang sebelumnya menggantungkan hidup pada sektor pertanian, perikanan, perburuan, atau hasil hutan harus menyesuaikan diri dengan kondisi baru yang muncul akibat pembangunan. Perubahan ini sering kali menimbulkan ketidakpastian ekonomi, terutama bagi kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan keterampilan di luar sektor tradisional.

Fenomena alih fungsi lahan terlihat pada berbagai wilayah adat di

Indonesia, termasuk kasus yang tergambar dalam film *Pesta Babi*. Film tersebut menunjukkan bagaimana masyarakat adat menghadapi ancaman kehilangan hutan dan tanah adat akibat ekspansi perkebunan dan proyek pembangunan berskala besar. Kehilangan ruang hidup tersebut tidak hanya berdampak pada sumber penghidupan, tetapi juga mengancam keberlangsungan budaya dan identitas masyarakat setempat.

Selain memengaruhi aspek ekonomi, alih fungsi lahan juga berdampak terhadap struktur sosial masyarakat. Perubahan ruang hidup sering kali mengubah pola hubungan sosial yang selama ini terbangun dalam komunitas. Aktivitas gotong royong, ritual adat, dan berbagai kegiatan sosial lainnya menjadi semakin berkurang karena ruang yang menjadi pusat aktivitas masyarakat telah berubah fungsi.

Alih fungsi lahan juga dapat memicu munculnya ketimpangan sosial. Masyarakat yang memiliki akses terhadap modal dan informasi biasanya lebih mudah memperoleh manfaat dari pembangunan dibandingkan kelompok masyarakat lokal yang terdampak secara langsung. Harvey (2008) menjelaskan bahwa pembangunan yang berorientasi pada akumulasi modal sering kali menghasilkan ketidakadilan ruang yang menyebabkan kelompok tertentu memperoleh keuntungan lebih besar dibandingkan kelompok lainnya.

Selain itu, alih fungsi lahan sering kali memicu konflik antara masyarakat lokal, pemerintah, dan pihak swasta. Konflik tersebut muncul karena adanya perbedaan kepentingan dalam pemanfaatan ruang dan sumber daya alam yang tersedia. Dalam banyak kasus, masyarakat merasa bahwa hak-hak

mereka atas tanah dan lingkungan tidak mendapatkan perlindungan yang memadai dari negara.

Menurut Peluso dan Lund (2011), konflik agraria pada dasarnya merupakan bentuk perebutan kontrol terhadap sumber daya yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Konflik semacam ini semakin sering terjadi ketika pembangunan dilakukan tanpa melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Akibatnya, muncul berbagai bentuk penolakan dan resistensi dari masyarakat yang merasa dirugikan.

Dari perspektif budaya, alih fungsi lahan dapat menyebabkan hilangnya ruang budaya yang selama ini menjadi tempat berlangsungnya berbagai aktivitas adat dan tradisi lokal. Ketika ruang budaya hilang, maka proses pewarisan nilai-nilai budaya kepada generasi muda menjadi semakin sulit dilakukan. Kondisi ini berpotensi menyebabkan terjadinya degradasi budaya dalam jangka panjang.

Oleh karena itu, kebijakan pembangunan perlu mempertimbangkan hak-hak masyarakat lokal dan adat agar transformasi ruang yang terjadi tidak menimbulkan ketidakadilan sosial maupun kerusakan budaya yang sulit dipulihkan. Pembangunan yang berkelanjutan harus mampu menyeimbangkan kepentingan ekonomi dengan perlindungan terhadap lingkungan, budaya, dan hak-hak masyarakat yang hidup di dalam ruang tersebut.

Migrasi Penduduk dan Pergeseran Struktur Demografi

Migrasi merupakan salah satu konsekuensi yang tidak dapat dipisahkan dari perubahan ruang dan pembangunan ekonomi. Menurut Lee (1966), migrasi terjadi karena adanya

faktor pendorong (*push factors*) dari daerah asal dan faktor penarik (*pull factors*) dari daerah tujuan yang memengaruhi keputusan seseorang untuk berpindah tempat tinggal. Faktor-faktor tersebut dapat berupa kesempatan kerja, pendidikan, fasilitas kesehatan, keamanan, maupun harapan memperoleh kehidupan yang lebih baik.

Pembangunan kawasan industri, perkebunan, pertambangan, dan proyek ekonomi baru biasanya menarik kedatangan tenaga kerja dari berbagai daerah. Kehadiran investasi dan pembangunan infrastruktur menciptakan peluang kerja yang mendorong masyarakat untuk melakukan migrasi. Kondisi ini menyebabkan meningkatnya jumlah penduduk pendatang yang kemudian mengubah komposisi demografi wilayah yang menjadi tujuan migrasi.

Perubahan struktur demografi akibat migrasi sering kali menciptakan masyarakat yang lebih heterogen dari segi budaya, bahasa, agama, dan kebiasaan sosial. Keberagaman tersebut dapat menjadi modal sosial yang memperkaya kehidupan masyarakat karena memungkinkan terjadinya pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan budaya. Namun demikian, keberagaman juga memerlukan kemampuan adaptasi dan toleransi agar tidak menimbulkan konflik sosial.

Migrasi yang terjadi dalam skala besar dapat mengubah karakteristik suatu wilayah. Daerah yang sebelumnya didominasi oleh masyarakat lokal secara perlahan menjadi lebih beragam akibat masuknya penduduk baru. Perubahan tersebut memengaruhi pola kehidupan masyarakat, baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun budaya. Bahkan dalam beberapa kasus, masyarakat pendatang

menjadi kelompok yang jumlahnya lebih besar dibandingkan penduduk asli.

Selain memengaruhi komposisi penduduk, migrasi juga berdampak terhadap hubungan sosial dalam masyarakat lokal. Masuknya penduduk baru dapat mengubah pola interaksi sosial yang sebelumnya bersifat homogen menjadi lebih kompleks dan dinamis. Hubungan antarindividu tidak lagi hanya didasarkan pada kedekatan kekerabatan, tetapi juga dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi, pekerjaan, dan aktivitas sosial lainnya.

Menurut Giddens (2013), masyarakat modern ditandai oleh meningkatnya mobilitas penduduk yang menyebabkan terjadinya perubahan struktur sosial secara terus-menerus. Mobilitas tersebut menghasilkan masyarakat yang lebih terbuka terhadap perubahan, tetapi pada saat yang sama juga menghadirkan tantangan dalam menjaga kohesi sosial dan solidaritas masyarakat.

Dalam banyak kasus, masyarakat lokal menghadapi tantangan untuk mempertahankan identitas budaya mereka di tengah meningkatnya pengaruh budaya dari luar. Kehadiran kelompok pendatang membawa nilai, kebiasaan, dan pola hidup baru yang secara perlahan dapat memengaruhi budaya masyarakat setempat. Jika tidak diimbangi dengan upaya pelestarian budaya, maka identitas lokal dapat mengalami pergeseran bahkan kehilangan sebagian karakteristiknya.

Migrasi juga berdampak terhadap penggunaan ruang dan lingkungan. Bertambahnya jumlah penduduk menyebabkan meningkatnya kebutuhan terhadap lahan permukiman, fasilitas pendidikan, kesehatan, serta sarana

transportasi. Akibatnya, ruang yang sebelumnya digunakan untuk kegiatan pertanian atau kawasan hijau sering kali berubah menjadi kawasan permukiman dan pusat kegiatan ekonomi.

Meskipun demikian, migrasi tidak selalu memberikan dampak negatif. Kehadiran penduduk baru dapat meningkatkan aktivitas ekonomi, memperluas jaringan sosial, serta memperkaya keberagaman budaya masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan migrasi perlu dilakukan secara terencana agar manfaat yang dihasilkan dapat dirasakan oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa menimbulkan konflik sosial.

Dengan demikian, migrasi menjadi salah satu faktor penting yang membentuk perubahan ruang sosial masyarakat dalam era pembangunan modern. Dampaknya tidak hanya terlihat pada perubahan jumlah dan komposisi penduduk, tetapi juga pada transformasi sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan yang terjadi dalam suatu wilayah.

Perubahan Mata Pencarian Masyarakat Lokal

Perubahan penggunaan lahan dan pembangunan ekonomi sering kali diikuti oleh perubahan mata pencarian masyarakat. Masyarakat yang sebelumnya bekerja di sektor pertanian, perikanan, perkebunan tradisional, atau kehutanan beralih ke sektor industri, jasa, perdagangan, dan berbagai pekerjaan modern lainnya. Transformasi ini merupakan bagian dari perubahan struktur ekonomi yang terjadi dalam proses pembangunan.

Menurut Todaro dan Smith (2021), transformasi ekonomi selalu diikuti oleh perubahan struktur pekerjaan dari sektor tradisional menuju sektor modern. Perubahan

tersebut terjadi karena pembangunan mendorong peningkatan aktivitas ekonomi pada sektor-sektor yang dianggap lebih produktif dan memiliki nilai tambah yang lebih tinggi. Akibatnya, tenaga kerja secara bertahap berpindah dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier.

Alih fungsi lahan menjadi kawasan industri, perkebunan skala besar, atau proyek infrastruktur menyebabkan berkurangnya ruang bagi aktivitas ekonomi tradisional masyarakat. Lahan pertanian yang selama ini menjadi sumber penghidupan berubah menjadi kawasan pembangunan sehingga masyarakat harus mencari alternatif pekerjaan lain untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Meskipun pembangunan membuka peluang ekonomi baru, perubahan mata pencarian tidak selalu berjalan mudah. Banyak masyarakat lokal mengalami kesulitan beradaptasi karena keterbatasan pendidikan, keterampilan, dan pengalaman kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri modern. Kondisi ini menyebabkan sebagian masyarakat tidak mampu bersaing dalam pasar tenaga kerja yang semakin kompetitif.

Kondisi tersebut dapat menyebabkan sebagian masyarakat kehilangan sumber pendapatan tradisional tanpa memperoleh pekerjaan baru yang layak. Akibatnya, ketimpangan ekonomi dan kerentanan sosial dapat meningkat. Kelompok masyarakat yang tidak memiliki kemampuan adaptasi yang memadai sering kali menjadi kelompok yang paling rentan terhadap dampak pembangunan.

Selain dampak ekonomi, perubahan mata pencarian juga memengaruhi pola kehidupan sosial masyarakat. Aktivitas budaya yang

sebelumnya berkaitan erat dengan pekerjaan tradisional menjadi semakin berkurang karena masyarakat mulai mengadopsi pola kerja yang berbeda. Tradisi gotong royong dalam pertanian, ritual panen, maupun kegiatan budaya yang berhubungan dengan alam mulai mengalami penurunan intensitas.

Menurut Soekanto (2017), perubahan pekerjaan akan memengaruhi struktur sosial masyarakat karena pekerjaan merupakan salah satu unsur penting yang membentuk status sosial dan pola interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Ketika masyarakat berpindah ke sektor ekonomi baru, maka pola hubungan sosial mereka juga akan mengalami perubahan.

Dalam beberapa kasus, perubahan mata pencaharian justru memberikan peluang peningkatan kesejahteraan. Masyarakat yang mampu beradaptasi dengan perkembangan ekonomi memperoleh akses terhadap pendapatan yang lebih tinggi, pendidikan yang lebih baik, serta peluang pengembangan diri yang lebih luas. Kondisi ini menunjukkan bahwa dampak pembangunan dapat bersifat positif apabila masyarakat memiliki kapasitas yang memadai untuk beradaptasi.

Namun demikian, proses adaptasi tersebut memerlukan dukungan dari pemerintah dan berbagai pihak terkait. Program pelatihan keterampilan, pendidikan vokasi, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan perlindungan sosial menjadi langkah penting untuk membantu masyarakat menghadapi perubahan yang terjadi.

Oleh karena itu, program pembangunan perlu disertai dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar masyarakat lokal dapat

beradaptasi dengan perubahan ekonomi yang terjadi dan memperoleh manfaat yang lebih besar dari pembangunan. Dengan demikian, transformasi mata pencaharian tidak hanya menjadi proses perubahan ekonomi, tetapi juga menjadi sarana peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Hilangnya Ruang Budaya dan Identitas Komunitas

Ruang budaya merupakan bagian penting dalam kehidupan masyarakat karena menjadi tempat berlangsungnya berbagai aktivitas sosial, adat istiadat, ritual keagamaan, dan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Ketika terjadi alih fungsi lahan akibat pembangunan, ruang budaya yang selama ini menjadi pusat kehidupan masyarakat sering kali mengalami penyempitan bahkan hilang sama sekali. Menurut Koentjaraningrat (2015), budaya tidak dapat dipisahkan dari lingkungan tempat masyarakat hidup dan berinteraksi karena ruang merupakan media utama dalam pewarisan nilai-nilai budaya.

Perubahan fungsi lahan menjadi kawasan industri, perkebunan, pertambangan, atau infrastruktur sering kali menyebabkan masyarakat kehilangan akses terhadap situs-situs budaya yang memiliki nilai historis dan spiritual. Hilangnya ruang budaya tersebut berdampak pada berkurangnya aktivitas adat yang selama ini menjadi identitas suatu komunitas. Akibatnya, generasi muda semakin jauh dari akar budaya yang diwariskan oleh leluhurnya.

Dalam perspektif antropologi budaya, identitas masyarakat terbentuk melalui hubungan yang kuat antara manusia, lingkungan, dan tradisi yang mereka jalankan. Geertz (1973) menjelaskan bahwa budaya

merupakan sistem makna yang diwariskan melalui simbol-simbol yang dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika ruang yang menjadi tempat berlangsungnya simbol budaya mengalami perubahan, maka identitas budaya masyarakat juga ikut mengalami transformasi.

Fenomena tersebut banyak ditemukan pada masyarakat adat yang wilayahnya mengalami ekspansi pembangunan. Kehadiran investasi berskala besar sering kali mengubah pola hubungan masyarakat dengan tanah adat, hutan, sungai, dan sumber daya alam lainnya. Perubahan tersebut tidak hanya berdampak terhadap ekonomi masyarakat, tetapi juga memengaruhi nilai-nilai sosial yang selama ini menjadi pedoman kehidupan mereka.

Hilangnya ruang budaya sering kali menyebabkan berkurangnya praktik-praktik adat yang selama ini menjadi sarana pendidikan sosial bagi generasi muda. Tradisi lisan, upacara adat, dan berbagai bentuk kearifan lokal menjadi semakin sulit diwariskan karena ruang yang mendukung pelaksanaannya sudah tidak tersedia seperti sebelumnya.

Selain itu, masuknya budaya luar melalui urbanisasi dan migrasi juga mempercepat proses perubahan identitas budaya. Generasi muda cenderung lebih mudah menerima budaya modern dibandingkan mempertahankan tradisi lokal. Kondisi ini berpotensi menyebabkan terjadinya degradasi budaya apabila tidak diimbangi dengan upaya pelestarian yang memadai.

Menurut Mulyana (2018), perubahan budaya merupakan proses yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan masyarakat modern. Namun demikian, perubahan tersebut perlu dikelola secara bijaksana agar tidak menghilangkan nilai-nilai budaya

yang menjadi ciri khas suatu komunitas. Budaya lokal tetap memiliki peran penting sebagai sumber identitas dan kohesi sosial masyarakat.

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, perlindungan ruang budaya harus menjadi bagian dari kebijakan pembangunan wilayah. Pengakuan terhadap situs budaya, wilayah adat, dan ruang sosial masyarakat dapat membantu menjaga keberlangsungan identitas budaya di tengah perubahan yang terjadi.

Pelestarian budaya tidak hanya menjadi tanggung jawab masyarakat lokal, tetapi juga memerlukan dukungan pemerintah, lembaga pendidikan, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Kerja sama tersebut penting untuk memastikan bahwa budaya lokal tetap hidup dan berkembang meskipun menghadapi berbagai tantangan modernisasi.

Oleh karena itu, pembangunan yang berkelanjutan perlu mempertimbangkan perlindungan ruang budaya sebagai bagian dari hak masyarakat. Pelestarian budaya tidak hanya berkaitan dengan menjaga tradisi, tetapi juga mempertahankan identitas sosial yang menjadi fondasi kehidupan suatu komunitas serta warisan berharga bagi generasi mendatang.

Konflik Agraria dan Perebutan Ruang Hidup

Alih fungsi lahan yang terjadi secara masif sering kali memunculkan konflik agraria antara masyarakat lokal, pemerintah, dan pihak swasta. Konflik tersebut umumnya berkaitan dengan perbedaan kepentingan dalam pemanfaatan tanah dan sumber daya alam. Menurut Wiradi (2009), konflik agraria merupakan bentuk pertentangan yang muncul

akibat ketimpangan penguasaan, pemanfaatan, dan kepemilikan tanah dalam masyarakat. Konflik ini menjadi salah satu konsekuensi yang sering muncul dalam proses pembangunan yang membutuhkan lahan dalam jumlah besar.

Pembangunan yang berorientasi pada investasi sering kali membutuhkan lahan dalam skala luas untuk pembangunan kawasan industri, perkebunan, pertambangan, maupun proyek infrastruktur. Dalam banyak kasus, proses pengadaan lahan menimbulkan permasalahan karena masyarakat merasa hak-hak mereka atas tanah tidak diakui secara memadai. Situasi ini menjadi semakin kompleks apabila wilayah yang terdampak merupakan kawasan adat yang memiliki nilai historis, sosial, dan budaya yang kuat bagi masyarakat setempat.

Konflik agraria tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga memengaruhi hubungan sosial masyarakat. Perselisihan mengenai kepemilikan dan penggunaan lahan dapat menimbulkan perpecahan di dalam komunitas maupun antara masyarakat dengan pihak luar. Bahkan, dalam beberapa kasus, konflik yang berkepanjangan dapat mengganggu stabilitas sosial dan menghambat aktivitas ekonomi masyarakat.

Menurut Peluso dan Lund (2011), konflik ruang hidup sering muncul ketika kebijakan pembangunan mengabaikan aspek keadilan sosial dan hak masyarakat lokal. Ketika masyarakat tidak dilibatkan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan, maka muncul perasaan terpinggirkan yang dapat memicu penolakan terhadap berbagai program pembangunan yang dijalankan.

Dalam konteks masyarakat adat, tanah tidak hanya dipandang sebagai aset ekonomi, tetapi juga sebagai bagian dari identitas dan keberlangsungan budaya. Tanah merupakan ruang hidup yang menyimpan sejarah, nilai spiritual, dan warisan leluhur yang diwariskan dari generasi ke generasi. Oleh karena itu, kehilangan tanah berarti kehilangan sebagian identitas kolektif masyarakat adat.

Fenomena perebutan ruang hidup juga menunjukkan adanya ketimpangan kekuasaan dalam pengelolaan sumber daya alam. Kelompok yang memiliki modal dan akses terhadap kebijakan sering kali berada pada posisi yang lebih kuat dibandingkan masyarakat lokal. Kondisi ini menyebabkan masyarakat menghadapi kesulitan dalam mempertahankan hak-hak mereka atas tanah dan sumber daya yang selama ini menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

Selain itu, konflik agraria sering kali berdampak terhadap keberlanjutan lingkungan. Perebutan ruang hidup dapat mendorong eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan sehingga menimbulkan kerusakan ekosistem. Akibatnya, masyarakat tidak hanya kehilangan tanah, tetapi juga kehilangan berbagai manfaat ekologis yang selama ini mendukung kehidupan mereka.

Penyelesaian konflik agraria memerlukan pendekatan yang partisipatif, transparan, dan berkeadilan. Pemerintah perlu memastikan bahwa seluruh pihak yang berkepentingan memperoleh kesempatan yang sama untuk menyampaikan aspirasi dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Dialog yang terbuka dapat menjadi sarana untuk menemukan

solusi yang dapat diterima oleh semua pihak.

Dengan demikian, konflik agraria dan perebutan ruang hidup merupakan persoalan multidimensional yang tidak hanya berkaitan dengan kepemilikan lahan, tetapi juga menyangkut aspek sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan. Oleh karena itu, pembangunan yang berkelanjutan harus menempatkan keadilan ruang sebagai salah satu prinsip utama agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat.

Dampak Pembangunan terhadap Masyarakat Adat

Masyarakat adat merupakan kelompok yang paling rentan terhadap dampak alih fungsi lahan dan ekspansi pembangunan. Ketergantungan mereka terhadap sumber daya alam menyebabkan perubahan ruang hidup memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap keberlangsungan kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya mereka. Berbeda dengan masyarakat perkotaan, masyarakat adat umumnya memiliki hubungan yang sangat erat dengan tanah, hutan, sungai, dan lingkungan tempat mereka tinggal.

Menurut Dove (2006), masyarakat adat memiliki hubungan yang erat dengan lingkungan karena sistem kehidupan mereka dibangun berdasarkan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Pengetahuan lokal yang mereka miliki berkembang melalui pengalaman panjang dalam mengelola alam. Oleh karena itu, perubahan lingkungan akibat pembangunan dapat mengganggu keseimbangan yang telah terbangun selama bertahun-tahun.

Pembangunan sering kali membawa peluang ekonomi baru melalui peningkatan investasi, pembangunan infrastruktur, dan penciptaan lapangan kerja. Namun, manfaat tersebut tidak selalu dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat adat. Banyak komunitas adat yang justru mengalami marginalisasi karena tidak memiliki akses yang cukup terhadap sumber daya, pendidikan, maupun kesempatan ekonomi yang tersedia.

Selain dampak ekonomi, pembangunan juga memengaruhi struktur sosial masyarakat adat. Perubahan pola mata pencaharian, masuknya penduduk pendatang, serta meningkatnya interaksi dengan budaya luar menyebabkan terjadinya perubahan nilai dan norma sosial yang selama ini menjadi dasar kehidupan komunitas. Akibatnya, solidaritas sosial yang sebelumnya kuat dapat mengalami pergeseran.

Dalam beberapa kasus, pembangunan bahkan menyebabkan hilangnya wilayah adat yang memiliki nilai budaya dan spiritual yang tinggi. Situs-situs adat, kawasan sakral, dan ruang ritual masyarakat dapat mengalami kerusakan atau hilang akibat pembangunan. Kondisi ini berdampak pada melemahnya praktik-praktik adat yang selama ini menjadi bagian penting dari identitas masyarakat.

Masuknya budaya modern melalui pembangunan juga mendorong perubahan pola pikir generasi muda masyarakat adat. Mereka mulai mengenal berbagai nilai dan gaya hidup baru yang berbeda dengan tradisi yang diwariskan oleh leluhurnya. Perubahan ini dapat memberikan manfaat dalam bentuk peningkatan wawasan dan pendidikan, tetapi juga berpotensi

mengurangi minat terhadap budaya lokal.

Menurut Koentjaraningrat (2015), keberlangsungan budaya sangat dipengaruhi oleh kemampuan suatu masyarakat dalam mewariskan nilai dan tradisinya kepada generasi berikutnya. Apabila proses pewarisan tersebut terganggu akibat perubahan lingkungan sosial dan ruang hidup, maka budaya lokal akan menghadapi ancaman kemunduran bahkan kepunahan.

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, banyak masyarakat adat yang menunjukkan kemampuan adaptasi yang tinggi terhadap perubahan. Mereka berusaha mempertahankan identitas budaya sambil menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Bentuk adaptasi tersebut terlihat melalui revitalisasi budaya, pendidikan adat, dan penguatan kelembagaan masyarakat lokal.

Oleh karena itu, pembangunan yang melibatkan wilayah adat perlu memperhatikan prinsip pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat adat agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara adil tanpa mengorbankan hak-hak budaya mereka. Pembangunan yang berkeadilan harus mampu menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian identitas budaya masyarakat adat.

Perubahan Nilai dan Tradisi Budaya Lokal

Urbanisasi dan migrasi membawa berbagai pengaruh baru yang mendorong perubahan nilai dan tradisi budaya lokal. Interaksi antara masyarakat lokal dan pendatang menciptakan proses pertukaran budaya yang berlangsung secara terus-menerus dalam kehidupan

sehari-hari. Proses tersebut menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan transformasi budaya dalam masyarakat modern.

Menurut Giddens (2013), modernisasi menyebabkan terjadinya perubahan sosial yang memengaruhi cara berpikir, pola perilaku, dan sistem nilai masyarakat. Perubahan tersebut merupakan bagian dari proses adaptasi terhadap perkembangan zaman, kemajuan teknologi, dan meningkatnya mobilitas manusia. Oleh karena itu, perubahan budaya menjadi fenomena yang hampir tidak dapat dihindari dalam masyarakat yang terus berkembang.

Masuknya budaya populer melalui media massa dan teknologi digital turut mempercepat proses perubahan budaya. Generasi muda cenderung lebih terbuka terhadap budaya global sehingga beberapa tradisi lokal mulai ditinggalkan karena dianggap kurang relevan dengan kehidupan modern. Penggunaan media sosial, internet, dan berbagai platform digital memperluas akses masyarakat terhadap berbagai bentuk budaya dari seluruh dunia.

Perubahan nilai budaya juga terlihat pada pola hubungan sosial masyarakat. Nilai-nilai kolektivitas, kebersamaan, dan gotong royong yang sebelumnya menjadi ciri utama masyarakat tradisional mulai bergeser menuju pola kehidupan yang lebih individualistik. Kondisi ini menunjukkan adanya transformasi sosial yang dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi, pendidikan, dan teknologi.

Selain itu, perubahan budaya dapat terlihat dari cara masyarakat memandang pekerjaan, pendidikan, keluarga, dan lingkungan. Masyarakat modern cenderung lebih menekankan efisiensi, produktivitas, dan pencapaian individu dibandingkan

nilai-nilai tradisional yang menekankan kebersamaan dan solidaritas sosial. Pergeseran tersebut menjadi bagian dari proses modernisasi yang berlangsung secara bertahap.

Meskipun demikian, perubahan budaya tidak selalu bersifat negatif. Dalam banyak kasus, masyarakat mampu melakukan adaptasi dengan menggabungkan unsur budaya lama dan budaya baru tanpa kehilangan identitas dasarnya. Proses ini dikenal sebagai akulturasi budaya yang memungkinkan terjadinya pembaruan sosial secara lebih dinamis dan kreatif.

Menurut Mulyana (2018), budaya bersifat dinamis dan selalu mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Kemampuan suatu masyarakat untuk beradaptasi terhadap perubahan menjadi faktor penting dalam menjaga keberlangsungan budaya di tengah arus globalisasi yang semakin kuat.

Di berbagai daerah di Indonesia, upaya pelestarian budaya terus dilakukan melalui pendidikan, kegiatan adat, festival budaya, dan penguatan peran lembaga adat. Berbagai kegiatan tersebut bertujuan untuk memperkenalkan kembali nilai-nilai budaya kepada generasi muda agar mereka tetap memiliki keterikatan dengan identitas lokalnya.

Dengan demikian, tantangan utama yang dihadapi masyarakat adalah menjaga keseimbangan antara keterbukaan terhadap perubahan dan upaya mempertahankan nilai-nilai budaya lokal yang menjadi identitas mereka. Pelestarian budaya tidak berarti menolak perubahan, melainkan mengelola perubahan secara bijaksana agar budaya lokal tetap hidup, berkembang, dan relevan dalam kehidupan masyarakat modern.

Strategi Adaptasi Masyarakat terhadap Perubahan Ruang

Perubahan ruang yang terjadi akibat urbanisasi, migrasi, dan pembangunan menuntut masyarakat untuk melakukan berbagai bentuk adaptasi. Adaptasi diperlukan agar masyarakat mampu mempertahankan keberlangsungan hidup sekaligus menyesuaikan diri dengan kondisi sosial dan ekonomi yang baru.

Menurut Soekanto (2017), adaptasi sosial merupakan proses penyesuaian individu maupun kelompok terhadap perubahan lingkungan agar dapat mempertahankan stabilitas kehidupan sosial. Proses ini dapat dilakukan melalui perubahan perilaku, pola kerja, maupun cara berinteraksi dengan lingkungan sekitar.

Salah satu bentuk adaptasi yang umum dilakukan adalah diversifikasi mata pencaharian. Masyarakat yang kehilangan akses terhadap lahan pertanian atau hutan mulai mencari sumber pendapatan alternatif melalui sektor perdagangan, jasa, maupun pekerjaan industri.

Selain adaptasi ekonomi, masyarakat juga melakukan adaptasi budaya dengan menyesuaikan tradisi dan praktik sosial terhadap perubahan yang terjadi. Beberapa komunitas berhasil mempertahankan identitas budaya mereka melalui revitalisasi adat, pendidikan budaya, dan pelaksanaan kegiatan tradisional secara berkelanjutan.

Peran lembaga adat dan organisasi masyarakat sangat penting dalam mendukung proses adaptasi tersebut. Kehadiran lembaga lokal mampu menjadi penghubung antara kebutuhan pembangunan dan upaya pelestarian budaya masyarakat.

Oleh karena itu, strategi adaptasi yang efektif memerlukan dukungan dari pemerintah, masyarakat, dan

berbagai pemangku kepentingan agar perubahan ruang yang terjadi dapat memberikan manfaat tanpa menghilangkan identitas sosial budaya masyarakat.

Pembangunan Berkelanjutan dan Perlindungan Budaya Lokal

Pembangunan berkelanjutan menjadi konsep yang semakin penting dalam menghadapi berbagai dampak urbanisasi, migrasi, dan alih fungsi lahan. Konsep ini menekankan pentingnya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan keberlanjutan sosial budaya.

Menurut laporan World Commission on Environment and Development (1987), pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang mampu memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya sendiri. Konsep tersebut menjadi dasar dalam perumusan berbagai kebijakan pembangunan di berbagai negara.

Dalam konteks perubahan ruang, pembangunan berkelanjutan menuntut adanya perlindungan terhadap hak-hak masyarakat lokal dan adat. Pengakuan terhadap kepemilikan lahan, ruang budaya, dan sumber daya tradisional menjadi bagian penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan.

Selain itu, partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan perlu diperkuat. Arnstein (1969) menegaskan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan merupakan syarat penting bagi terciptanya pembangunan yang demokratis dan berkelanjutan.

Pembangunan yang memperhatikan aspek budaya akan

membantu menjaga keberagaman sosial sekaligus memperkuat identitas masyarakat di tengah arus globalisasi. Budaya lokal dapat menjadi modal sosial yang mendukung keberhasilan pembangunan apabila dilestarikan dan dikembangkan secara tepat.

Berdasarkan hasil kajian, pembangunan yang berkelanjutan harus menempatkan manusia, lingkungan, dan budaya sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dengan pendekatan tersebut, pembangunan tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mampu menjaga keberlanjutan ruang hidup dan warisan budaya bagi generasi mendatang.

D. Kesimpulan

Urbanisasi, migrasi, dan perubahan budaya merupakan fenomena yang saling berkaitan dalam proses transformasi ruang yang terjadi akibat pembangunan dan alih fungsi lahan. Hasil kajian menunjukkan bahwa urbanisasi tidak hanya mengubah struktur fisik wilayah, tetapi juga memengaruhi pola kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Perkembangan kawasan industri, perkebunan, pertambangan, serta proyek infrastruktur telah mendorong terjadinya perubahan penggunaan lahan yang berdampak pada pergeseran fungsi ruang dari ruang sosial dan budaya menjadi ruang ekonomi yang berorientasi pada pertumbuhan dan investasi.

Migrasi yang menyertai proses pembangunan turut menyebabkan perubahan struktur demografi dan pola interaksi sosial masyarakat. Masuknya penduduk dari berbagai daerah menciptakan keberagaman sosial yang dapat menjadi sumber

kemajuan, tetapi juga menghadirkan tantangan dalam menjaga harmoni sosial dan identitas budaya lokal. Di sisi lain, perubahan mata pencaharian akibat berkurangnya akses terhadap lahan dan sumber daya alam menyebabkan masyarakat harus melakukan berbagai bentuk adaptasi untuk mempertahankan keberlangsungan hidup mereka.

Kajian ini juga menunjukkan bahwa alih fungsi lahan memberikan dampak yang sangat besar terhadap masyarakat adat dan komunitas lokal. Kehilangan ruang hidup tidak hanya berpengaruh terhadap aspek ekonomi, tetapi juga mengancam keberlangsungan nilai-nilai budaya, tradisi, dan identitas sosial yang telah diwariskan secara turun-temurun. Fenomena yang tergambar dalam berbagai kasus pembangunan, termasuk yang direpresentasikan dalam film *Pesta Babi*, memperlihatkan bahwa pembangunan yang tidak mempertimbangkan aspek sosial budaya berpotensi menimbulkan konflik agraria, marginalisasi masyarakat lokal, serta hilangnya warisan budaya yang bernilai tinggi.

Oleh karena itu, pembangunan perlu dilaksanakan dengan pendekatan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat harus membangun sinergi dalam menciptakan kebijakan pembangunan yang menghormati hak-hak masyarakat lokal dan adat, melindungi ruang budaya, serta menjaga kelestarian lingkungan. Pembangunan yang berkelanjutan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus mampu menjamin keberlanjutan sosial dan budaya sebagai bagian dari identitas bangsa.

Dengan demikian, urbanisasi, migrasi, dan perubahan budaya dalam ruang perlu dipahami sebagai bagian dari dinamika pembangunan yang memerlukan pengelolaan secara bijaksana. Keseimbangan antara pembangunan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan pelestarian budaya menjadi kunci utama dalam mewujudkan pembangunan yang adil, berkelanjutan, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa menghilangkan identitas budaya yang menjadi kekayaan bangsa Indonesia.

Daftar Pustaka

- Arnstein, S. R. (1969). A Ladder of Citizen Participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216–224.
- Brundtland, G. H. (1987). *Our Common Future*. Oxford: Oxford University Press.
- Bryant, C. R., & Johnston, T. R. R. (1992). *Agriculture in the City's Countryside*. London: Belhaven Press.
- Creswell, J. W. (2018). *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Davis, K. (1965). The Urbanization of the Human Population. *Scientific American*, 213(3), 41–53.
- Dove, M. R. (2006). Indigenous People and Environmental Politics. *Annual Review of Anthropology*, 35, 191–208.
- Geertz, C. (1973). *The Interpretation of Cultures*. New York: Basic Books.
- Giddens, A. (2013). *Sociology* (7th ed.). Cambridge: Polity Press.
- Harvey, D. (2008). *The Right to the City*. *New Left Review*, 53, 23–40.

- Koentjaraningrat. (2015). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Krippendorff, K. (2018). *Content Analysis An Introduction to Its Methodology* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Lee, E. S. (1966). A Theory of Migration. *Demography*, 3(1), 47–57.
- Lefebvre, H. (1991). *The Production of Space*. Oxford: Blackwell Publishing.
- Mulyana, D. (2018). *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Peluso, N. L., & Lund, C. (2011). New Frontiers of Land Control. *Journal of Peasant Studies*, 38(4), 667–681.
- Soekanto, S. (2017). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2021). *Economic Development* (13th ed.). Harlow: Pearson Education.
- Tönnies, F. (2017). *Community and Society (Gemeinschaft and Gesellschaft)*. New York: Routledge.
- UN-Habitat. (2022). *World Cities Report 2022 Envisaging the Future of Cities*. Nairobi: United Nations Human Settlements Programme.
- United Nations. (2023). *World Social Report 2023 Leaving No One Behind in an Ageing World*. New York: United Nations.
- Wiradi, G. (2009). *Seluk Beluk Masalah Agraria Reformasi Agraria dan Penelitian Agraria*. Yogyakarta: STPN Press.
- World Bank. (2023). *World Development Report 2023 Migrants, Refugees, and Societies*. Washington, DC: World Bank.
- Zed, M. (2018). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.